

ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Tri Fani Amaliah Nusi^{1*}, Julie Abdullah², Wahyudin Hasan³

^{1,2,3}Universitas Gorontalo

E-mail : trifaniamaliahnusi15@gmail.com*

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Otonomi daerah dijadikan dasar untuk melakukan pembangunan daerah secara mandiri dengan menggunakan sumber daya dan potensi daerah. Hal ini tercantum pada perundang-undangan No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah di Kabupaten Bone Bolango, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Untuk memperoleh data dengan menggunakan instrument yang berupa Observasi langsung, Wawancara, Dokumentasi, dan penilitian kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2019-2021 tingkat kemandirian keuangan daerah Bone Bolango Masih tergolong sangat rendah. Hal ini dikarenakan Pendapatan asli Daerah kabupaten Bone Bolango Masih sangat Tergantung dari Dana Transfer Pusat dengan Bantuan Terbesar DAU dan DAK.</i></p>	<p>Diajukan: 21-3-2023 Diterima: 18-4-2023 Diterbitkan : 25-5-2023</p>
<p>Abstract</p> <p><i>Regional autonomy is used as the basis for carrying out regional development independently by using regional resources and potential. This is stated in law no. 32 of 2004 concerning local government. So this study aims to determine the level of regional financial independence in supporting regional autonomy in Bone Bolango Regency, this study uses a quantitative method using the Regional Financial Independence Ratio. To obtain data using instruments in the form of direct observation, interviews, documentation, and literature research. The data analysis technique in this study uses the Regional Financial Independence Ratio (RKKD). The results of this study show that from 2019-2021 the level of financial independence in the Bone Bolango area is still very low. This is because the original regional income of the Bone Bolango district still depends heavily on the Central Transfer Fund with the Largest Assistance from DAU and DAK.</i></p>	<p>Kata kunci: Rasio Kemandirian; Otonomi Daerah</p> <p>Keywords: Independence Ratio; Regional autonomy</p>
<p>Cara mensitasi artikel: Nusi, T.F.A, Abdullah, J., & Hasan, W. (2023). Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dalam Mendukung Otonomi Daerah di Kabupaten Bone Bolango. <i>IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy</i>, 1(1), 37-45. https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN</p>	

PENDAHULUAN

Di negara Indonesia pengaplikasian otonomi daerah dilandasi oleh tiga tujuan yaitu meliputi tujuan administratif, tujuan ekonomi dan tujuan politik. Otonomi daerah memiliki arti umum sebagai pelimpahan wewenang pusat kepada pemerintah daerah agar dapat mengelola sumberdaya daerahnya sendiri dengan lebih maksimal (Noviatamara, 2019). Otonomi daerah dijadikan dasar untuk melakukan pembangunan daerah secara mandiri

dengan menggunakan sumber daya dan potensi daerah tersebut. Hal ini tercantum pada perundang-undangan No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yaitu bahwa pemerintah daerah berwewenang sepenuhnya terhadap daerah tersebut dalam melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola rumah tangganya serta mampu untuk membiayai operasional rumah tangganya tersebut secara mandiri. Tetapi, konsekuensi yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka harus di irini dengan bekerja lebih keras agar mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah yang optimal.

Peraturan tersebut mengakibatkan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan pelaksanaannya dalam membangun ekonomi daerah, terutama dalam mengelola keuangan daerah adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka memuat sumber-sumber penerimaan keuangan yang dikelola daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah seperti yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan ataupun penerimaan lain-lain harus dipertanggung jawab secara transparan dan akuntabel. Pemerintah sebagai pengelola keuangan harus menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dananya.

Kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dinilai dari besar kecilnya PAD yang diperoleh daerah itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa PAD merupakan indicator penting dalam menentukan tingkat ketergantungan suatu daerah. Semakin besar PAD maka akan semakin kecil tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap penerimaan lain. Pelaksanaan pembangunan daerah harus terus ditingkatkan karena salah satu indicator keberhasilan pembangunan suatu daerah yakni bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi (Juliyansyah, 2012). Tinggi atau pun rendah suatu laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dilihat dari adanya perubahan pada kesejahteraan ekonomi masyarakatnya (Putra & Hidayat, 2016).

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ketahun pada periode tertentu menunjukkan adanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat pula. Begitupun sebaliknya. Petumbuhan ekonomi juga merupakan acuan dalam mengambil kebijakan selanjutnya di pemerintahan yang akan datang, apakah kebijakan tersebut perlu dilanjutkan atau perlu diperbaiki sehubungan dengan peran pemerintahan dalam perekonomian. Kemandirian keuangan juga merupakan peran penting pemerintah dalam menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencukupi kegiatan pemerintah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu meningkatkan investasi belanja lainnya. Kemandirian daerah menggambarkan bagaimana kemampuan pemerintah dalam meningkatkan PAD seperti halnya pajak dan Retribusi daerah dan lain-lain pembangunan daerah dapat terwujud jika disertai dengan kemandirian daerah yang dilakukan secara efektif.

Menurut Hadi,2010 dalam (W. Hasan & Jumiyan, 2021) kemandirian daerah yang dimaksud ialah seberapa besar tingkat kemandirian Pemerintah daerah dalam mendanai segala aktivitasnya. Maka dari itu bukanlah hal yang mudah dalam menangani factor yang menyebabkan rendahnya tingkat kemandirian. Hadi dalam Iman Firmansyah (2017)

menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah dilihat dari besar kecilnya tingkat kemandirian di suatu daerah untuk dapat membiayai semua keperluan atau kebutuhan. Tolak ukur untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mengurus daerahnya adalah keahlian mandiri bagian keuangan. Maka tingkat kemandirian suatu daerah sangat penting dalam pembangunan otonomi daerah, dikarenakan tanggung jawab yang telah diberikan kepada pemerintah daerah yang sepenuhnya telah diberi wewenang agar dapat membangun suatu daerah tersebut dengan PAD yang di hasilkan oleh daerah tersebut sehingga resiko resiko yang didapati oleh pemerintah daerah dalam membangun daerah harus dikendalikan dengan baik agar berjalannya pelaksanaan otonomi daerah.

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu Kabupaten yang berada dalam Provinsi Gorontalo, sebagai salah satu daerah otonom yang berupaya secara berkesinambungan untuk terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah baik dalam hal pengelolaan maupun peningkatan kapasitas fiskal daerah. Sebab dengan adanya otonomi daerah ini maka pemda harus meningkatkan kemandirian keuangan. pendapatan yang ada di daerah Bone Bolango tidak sebanding dengan belanja daerah sehingga belum mampu secara keuangan untuk mebiayai sendiri daerahnya.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa mandiri Kabupaten Bone Bolango dalam hal keuangan untuk mendukung Otonomi daerahnya sehingga tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat. Dilihat dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti Pratiwi Laere, bahwa pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango masih tergolong dibawah angka ideal yang ditunjukkan oleh angka rasio. Hal ini menunjukkan bahwa Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditingkatkan untuk mewujudkan kemandirian Kabupaten tersebut. Namun ada sesuatu hal yang ditemukan oleh peneliti yaitu saat ini Kabupaten Bone Bolango Banyak melakukan peningkatan namun setelah dilihat dari laporan realisasi anggaran bahwa semua pembangunan yang terjadi bukan hasil dari PAD daerah itu sendiri namun dari transfer pemerintah pusat.

Oleh karena itu kepada bapak bupati Pak Hamim Pou dan pemerintah Kabupaten Bone Bolango lebih kreatif lagi dalam mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada khususnya menyadarkan kepada masyarakat agar dapat membayar tepat waktu atau penggalan sumber daya alam baru, juga dengan lebih banyak memabangu pusat pariwisata sehingga PAD bukan hanya bersumber dari Pajak Dan retribusi namun dengan adanya Pariwisata maka akan lebih meningkat penghasilan PAD dan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu memiliki tingkat kemandirian keuangan dalam mendukung otonomi daerah dalam membelanjai daerah sendiri. Dari penjelasan diatas diperlukan suatu riset untuk mengetahui seberapa mandiri daerah tersebut dalam membiayai semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah di daerah tersebut.

Maka dari hasil penelitian terdahulu, sehingga menimbulkan sebuah pemikiran baru peneliti untuk meneliti Kembali tingkat kemandirian daerah di Bone Bolango dan melihat apakah telah terjadi peningkatan terhadap kemandirian keuangan Kabupaten Bone Bolango, melihat dari telah banyak pembangunan yang telah dilakukan oleh Kabupaten Bone Bolango, maka harus melihat kemandirian keuangan Daerah tersebut jangan sampai hanya pembangunan yang meningkat namun keuangannya masih belum mandiri dan masih tergantung dari biaya transfer pusat dan belum dapat membelanjai daerahnya dengan hasil dari Pendapatan Asli Daerah tersebut sehingga pembangunan hanya

berdasarkan anggaran yang diberikan oleh pusat, maka menimbulkan opini awal peneliti bahwa telah adanya peningkatan terhadap kemandirian otonomi daerah Kabupaten Bone Bolango Dalam melihat kemandirian keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah di hitung menggunakan rasio kemandirian, rasio kemandirian diambil agar dapat melihat seberapa mandiri daerah tersebut dalam membiayai daerahnya tersebut, jangan hanya pembangunannya saja yang berkembang atau meningkat namun keuangannya juga harus mandiri dan tidak mengharapkan biaya transfer dari pusat. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah Kabupaten Bone Bolango telah mengalami peningkatan kemandirian otonomi daerahnya dengan judul Analisis rasio kemandirian daerah dalam mendukung otonomi daerah di kabupaten bone bolango.

METODE

Jenis penelitian ini yaitu jenis kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka. Sumber data penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data dengan menggunakan instrument yang berupa Observasi langsung, Wawancara, Dokumentasi, dan penelitian kepustakaan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Formula rasio kemandirian menurut (Mahmudi, 2010) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria kemandirian keuangan daerah

Rasio Kemandirian	Kriteria
0% - 25%	Sangat Rendah
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Sumber Halim 2007 dalam P. Laere 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Total Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan uang yang diterima melalui rekening kas umum daerah agar menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak suatu daerah yang telah ditetapkan dalam satu tahun periode anggaran dan tidak perlu dibayar Kembali oleh daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dan pendapatan Transfer dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. Berikut tabel pendapatan daerah kabupaten bone bolango pada periode 2019 – 2021

Tabel 2 Total Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Periode 2019-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp)	Total pendapatan Daerah (Rp)
2019	Rp.75.724.604.086	Rp.732.445.655.477	Rp.168.367.605.700	Rp.976.537.865.263
2020	Rp.75.145.390.393	Rp.709.371.210.341	Rp.177.986.623.032	Rp.962.503.223.766

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp)	Total pendapatan Daerah (Rp)
2021	Rp.90.519.203.018	Rp.889.339.280.129	Rp.31.420.407.195	Rp.1.011.278.890.342

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan hasil data pada table di atas, total Pendapatan Daerah yang dihasilkan dari penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hasi Total Pendapatan Daerah pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 976.537.865.263,44. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga menjadi Rp. 962.503.233.766,60 turunya Pendapatan Daerah dipengaruhi oleh turunya sumber pendapatan daerah dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat besar disebabkan oleh naiknya Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer menjadi Rp. 1.011.278.890.342,79.

b. Analisis Data

Pada dasarnya otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan terhadap daerah itu sendiri dalam membiayai diri sendiri dan mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat, otonomi daerah ialah kebebasan atau kemandirian. Dengan pemberian tanggung jawab tersebut maka demi dapat membiayai rumah tangganya sendiri maka daerah tersebut harus meningkatkan sumber daya alam dan juga sumber daya keuangannya.

Analisis rasio keuangan ialah kegiatan yang mengidentifikasi ciri – ciri yang penting tentang posisi keuangan dan aktivitas perusahaan berdasarkan laporan keuangan (Djaini 2016). Dalam penelitian ini digunakan rasio kemandirian dalam menganalisis kemandirian keuangan terhadap daerah tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Data yang dipakai dalam penelitian ini diambil dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2019 sampai 2021. Berikut analisis kemandirian keuangan

- Rasio kemandirian Keuangan Daerah

Sesuai dengan penjelasan Rahma (2014) rasio kemandirian mencerminkan wilayah tersebut bergantung pada dana provinsi maupun transfer dari pemerintah pusat, sehingga angka yang dihasilkan menunjukkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai wilayahnya sendiri.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer/provinsi}} \times 100\% \\ \text{Rasio Kemandirian 2019} &= \frac{\text{Rp } 75.724.604.086}{\text{Rp } 732.445.655.477} \times 100\% \\ &= 10,33\% \end{aligned}$$

Sesuai dengan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019, sebesar Rp. 75.724.604.086 dibandingkan dengan transfer pusat / provinsi sebesar Rp. 732.445.655.477 dikalikan 100% , maka rasio kemandirian tahun 2019 mencapai 10,33%, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Bone Bolango Masih berada Pada tingkat sangat rendah. Dilihat dari kabupaten Bone Bolango Masih bergantung pada Dana Transfer pusat.

$$\begin{aligned}\text{Rasio Kemandirian 2020} &= \frac{\text{Rp } 75.145.390.393}{\text{Rp } 709.371.210.341} \times 100\% \\ &= 10,59\%\end{aligned}$$

Sesuai dengan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 sebesar Rp. 75.145.390.393, dibandingkan dengan Transfer Pusat/Provinsi sebesar Rp. 709.371.210.341 dikalikan 100%, maka rasio Kemandirian tahun 2020 mencapai 10,59%, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Bone Bolango Masih di tahap sangat rendah dan persentasenya meningkat dari tahun 2019.

$$\begin{aligned}\text{Rasio Kemandirian 2021} &= \frac{\text{Rp } 90.519.203.018}{\text{Rp } 889.339.380.129} \times 100\% \\ &= 10,17\%\end{aligned}$$

Berdasarkan data dari Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2021, sebesar Rp. 90.519.203.018 dibandingkan dengan pendapatan transfer sebesar Rp. 889.339.380.129 Dikalikan 100% menghasilkan persentase sebesar 10,17%, maka tingkat kemandirian keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango masih tergolong sangat rendah, dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, maka dengan penjelasan tersebut kabupaten Bone Bolango masih sangat tergantung dengan dana transfer dari pusat atau provinsi. Belum tergolong mandiri seutuhnya. Berikut tabel menampilkan kriteria hasil perhitungan analisis rasio Kemandirian

Tabel 3. Kriteria hasil perhitungan Analisis Rasio Kemandirian

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan dari Pemerintah Pusat (Rp)	Tingkat kemandirian (%)	Kriteria
2019	Rp.75.724.604.086	Rp.732.445.655.477	10,33	Sangat rendah
2020	Rp.75.145.390.393	Rp.709.371.210.341	10,59	Sangat rendah
2021	Rp.90.519.203.018	Rp.889.339.280.129	10,17	Sangat rendah
Rata – Rata			10,36	Sangat rendah

Pembahasan

Kemandirian keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah, suatu wilayah pasti bergantung terhadap anggaran yang diberukan oleh pemerintah pusat atau provinsi, jadi rasio kemandirian keuangan adalah cerminan dari kemandirian keuangan daerahnya, begitu pula yang dijelaskan oleh Rahma (2014). Berdasarkan data diolah di atas maka terbilang pada tahun 2019 – 2021 masih sangat rendah atau dalam angka kurang ideal karena terjadinya naik turun dari hasil perhitungan data di atas.

Pada periode 2019 hasil persentase rasio Kemandirian tergolong sangat rendah dan hanya mencapai 10,25%, dikarenakan pada tahun 2019 pemungutan pajak belum teroptimalisasi dengan baik karena itulah pajak daerah belum mencapai anggaran yang di tetapkan. maka dengan hasil yang sangat rendah tersebut, Kabupaten Bone Bolango belum dapat mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah dan masih sangat tergantung dari dana transfer pusat, dan paling besar penerimaan ialah DAU yang cukup besar dilihat dari laporan keuangan pada laporan realisasi anggaran dan pendapatan daerah. Dari periode

2019 sampai 2021, dengan hasil yang belum dikatakan ideal maka Bupati Bone Bolango Bapak Hamim Pou lebih meningkatkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar lebih meningkat agar dapat mengoptimalkan PAD agar dapat mencapai target, pada tahun 2019 pendapatan pajak, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah masih belum mencapai target, maka demi mengoptimalkan pendapatan daerah Bupati Bone Bolango Bapak Hamim Pou memerintahkan kepada Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bone Bolango, agar lebih proaktif dalam memungut retribusi daerah dan lebih meningkatkan potensi – potensi pendapatan daerah. Dengan keseriusan dan lebih proaktif lagi dalam hal peningkatan PAD maka bukan hanya perangkat Daerahnya saja yang menjadi perhatian namun kepada masyarakatnya juga lebih mematuhi aturan. Kepala dinas kelautan Bone Bolango Syaiful Uma mengatakan bahwa sumber dana terbesar berasal dari aktivitas pelelangan ikan namun beliau menjelaskan bahwa angka itu masih terbilang kecil dikarenakan ketidakpatuhan di saat membayar retribusi masyarakat pengguna pelelangan ikan. Jika kepatuhan dijalankan dan membayar retribusi maka akan dapat membantu optimalisasi pendapatan daerah.

Pada tahun 2020 Rasio kemandirian keuangan daerah mengalami sedikit peningkatan sebesar 10,51% namun belum bisa mencapai angka ideal, sebab angka tersebut masih tergolong sangat rendah, akan tetapi mengalami peningkatan dari tahun kemarin. pada tahun 2020 pendapatan Retribusi daerah melebihi target, sehingga sedikit meningkatkan persentase dari Rasio Kemandirian Keuangan. namun sama seperti tahun kemarin pemungutan pajak daerah belum mencapai target yang di tentukan. hal tersebut harus lebih di perhatikan sehingga lebih memperketat pemungutan pajak agar daerah tidak lagi bergantung lebih pada dana transfer dari pusat. juga optimalisasi Pendapatan Daerah dengan cara membangun dan memperbaiki juga meningkatkan layanan Publik. Pendapatan asli daerah pada tahun ketahun mengalami fluktuasi dan itu masih termasuk dalam angka kurang ideal atau rendah, dan juga dilihat dari Laporan realisasi PAD tahun 2020 pemda masih bergantung pada dana transfer pusat lebih tepatnya DAU dan DAK. Sehingga kemandirian dalam membiayai daerahnya sendiri masih sangat rendah.

Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan Kembali sebesar 10,16%, berdasarkan laporan realisasi anggaran pada tahun 2021 PAD – nya mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun kemarin, namun sayangnya masih menurunkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan walaupun PAD nya lebih dari tahun tahun kemarin hal itu disebabkan pinjaman dan dana Transfer terbilang besar dari tahun – tahun sebelumnya sehingga sebesar apapun PAD yang di Dapatkan namun Dana transfer dan pinjaman juga besar maka hasilnya tidak akan mencapai angka ideal, dengan begitu agar dapat mencapai target angka ideal maka menurunkan penggunaan dana transfer dan lebih mengoptimalkan Pendapatan asli lebih proaktif dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Dilihat dari hasil di analisis, terlihat perbandingan antara peneliti sebelumnya “Pratiwi Laere (2020)” Rasio Kemandirian Keuangan daerah memiliki kriteria sangat rendah. Menurut penelitian Sebelumnya Pratiwi Laere Kemandirian Keuangan Daerah Sangat Rendah begitu pula Penelitian Yang di lakukan saat ini Masih Bergantung pada dana pemerintah pusat/provinsi, dan keinginan daerah agar lebih kreatif dan lebih proaktif dalam menggali sumber pendapatan asli daerah sehingga bantuan dari

pemerintah pusat berkurang. Berdasarkan hipotesis yang diajukan maka dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan daerah masih sangat rendah secara umum, hal tersebut dikarenakan Bantuan Dari Pemerintah pusat masih sangat besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah, maka Hipotesis diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pemda Kabupaten Bone Bolango maka Simpulan yang diambil adalah berdasarkan rasio Kemandirian Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi, namun masih belum mencapai angka ideal, dan walaupun pada tahun 2020 mengalami peningkatan persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Namun masih tergolong sangat rendah sehingga masih dikatakan belum mandiri dalam mendukung otonomi daerah dikarenakan Pendapatan asli Daerah kabupaten Bone Bolango Masih sangat Tergantung dari Dana Transfer Pusat dengan Bantuan Terbesar DAU dan DAK.

DAFTAR RUJUKAN

- Bachtiar, A. (2014). *Definisi Akuntansi Pemerintahan*. Erlangga.
- Baswir, R. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia* (3rd ed.). BPFE.
- Dharma Setyawan Salam. (2004). *Otonomi Daerah dalam perspektif lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Djambatan, Jakarta*.
- Halim, A. (2022). Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pelayanan Parkir Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju The Effect of Market Service Charges and Parking Service Charges on Increasing PAD in Mamuju Regency. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi*. 1(1), 1-9.
- Halim Abdul. (2011). *Manajemen Keuangan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasan, W., & Jumiyanti, K. R. (2021). Peta Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 2086-4264.
- Hossein, B. (2010). *Hossein, B, (2010). Kewenangan Pengelola. Sumber Daya Alam Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 30-01 Oktober, Jakarta*.
- Julie Abdullah1, W. H., & 1, 2Universitas. (2022). Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Pendahuluan. *Gorontalo Accounting Jurnal*, 5(2), 208-213. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i2.2414>
- Juliyansyah. (2012). analisis faktor - faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten kutai barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Kansil, C. S. . (2009). *pemerintahan daerah di indonesia : hukum administrasi daerah*. Jakarta : Sinar Grafika , 2004.
- mamesah D.J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.
- mamesah dan halim. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat, 2008*. Jakarta: Salemba Empat.
- marbun. (2005). *Otonomi daerah 1945-2005 proses dan realita / Marbun, B.N*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Noviatamara, A. (2019). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). *Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 161-173.
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan*

- Pembangunan Daerah*, 3(4), 243–256. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3526>
- Rasyid, M, R, Gattar, A, S. (2010). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- suparmoko. (2002). *Suparmoko, 2002. Ekonomi public untuk keuangan dan pembangunan daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta:andi. Edisi Pertama. Yogyakarta:andi.*